

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas tentang strategi Tiongkok untuk membangun kerja sama global melalui inisiatif *Belt and Road*. *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah salah satu strategi pembangunan global yang dikeluarkan oleh Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping. Kebijakan BRI dibuat dengan tujuan untuk menghubungkan ekonomi Eurasia dan infrastruktur, perdagangan, investasi, membangun kemitraan, mengatur dimensi jaringan konektivitas, memperluas dan memperkuat hubungan kerja sama yang terbuka terhadap negara-negara dalam Asia, Afrika, Tiongkok, dan Eropa dengan membangun jalur darat serta jalur maritim yang nantinya akan menghubungkan negara-negara dalam kawasan tersebut (Express Web Desk, 2017). Proyek ini mencakup dua aspek yaitu *The Silk Road Economic Belt* dan *The 21st Century Maritime Silk Road*.

Aspek pertama yakni *The Silk Road Economic Belt* adalah rute jalur darat untuk menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Timur Tengah, hingga Eropa melalui jaringan rel kereta api, jalan raya, jembatan, dan jaringan pipa baru. Sedangkan, *The 21st Century Maritime Silk Road* adalah rute jalur laut untuk menghubungkan pantai selatan Tiongkok dengan Laut Tengah (Mediterrania), Afrika, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Eropa (Seth, 2019). Kebijakan ini dianggap sebagai sebuah proyek raksasa yang dikeluarkan oleh Negeri Tirai Bambu karena mencakup $\frac{2}{3}$ populasi global dan $\frac{3}{4}$ sumber energi (OECD, 2018).

Belt and Road Initiative (BRI) hadir sebagai sebuah proyek ambisius Tiongkok dengan memanfaatkan Jalur Sutra (*The Silk Road*) untuk menghubungkan Tiongkok bukan saja dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, melainkan hingga di berbagai belahan dunia untuk mencapai kepentingannya terutama dalam bidang ekonomi dan menghidupkan kembali kejayaannya yang pernah ada di awal peradaban dunia sebelum dilanda oleh kemiskinan dan peperangan yang memakan waktu cukup lama yang telah menyebabkan kemerosotan terutama dalam bidang ekonomi.

Dengan catatan sejarah lebih dari 4.000 tahun, Tiongkok merupakan salah satu dari beberapa negara yang berkembang secara ekonomi dan budaya di tahap awal peradaban dunia. Kejayaan Tiongkok di masa lalu disimbolkan dengan hadirnya Jalur Sutra sebagai simbol kekuatan dan keberhasilan Tiongkok. Dengan membentang dari Tiongkok hingga Romawi atau sekitar 6.000 km dan menghubungkan antara wilayah Timur dan Barat, Jalur Sutra pada masa lampau digunakan sebagai jalur perdagangan yang telah berperan penting bagi pengembangan ekonomi Tiongkok sejak zaman dinasti. Alasan Jalur Sutra menjadi simbol kejayaan Tiongkok karena komoditas utama yang diperdagangkan adalah sutra dan hanya diproduksi oleh Tiongkok saja sehingga Tiongkok memonopoli produksi sutra dan menjadi pemain dominan dalam jalur tersebut (Silin yakov, 2017). Seiring perkembangan zaman, Jalur Sutra mengalami keruntuhan yang diikuti oleh kejatuhan dari dinasti yang memimpin di Tiongkok, hal ini membuat adanya kekacauan politik dan ekonomi yang tidak stabil yang turut mempengaruhi aktivitas di jalur tersebut.

Setelah keruntuhan kejayaannya dan memasuki perkembangan zaman, Tiongkok kerap terjadi peperangan yang memakan waktu lama dan membuat Tiongkok harus mengalami kemerosotan. Hingga saat dipimpin oleh Mao Zedong, Negeri Tirai Bambu ini menutup diri dari dunia internasional, mengisolasi dirinya dari intervensi asing dan lebih memilih berdiri di atas kaki sendiri. Serta berbagai kebijakan yang dikeluarkannya yang sangat otoriter hanya merugikan rakyat dan membuat kondisi perekonomian Tiongkok semakin buruk. Akhir kepemimpinan Mao adalah tanda awal kemajuan bagi Tiongkok dan yang mendorongnya menjadi salah satu negara dengan pengaruh besar di dunia terutama dalam bidang perekonomian (Wicaksono, 2017).

Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao dianggap sebagai masa kelam dengan harus menghadapi berbagai krisis yang ada. Melihat hal ini, sejak diambil alih oleh Deng Xiaoping, ia mulai menginisiasi reformasi untuk memajukan perekonomian Tiongkok melalui tiga fase reformasi yaitu reformasi tahap pertama Tiongkok pada 1978-1984 yang dikenal dengan reformasi sektor pedesaan yang akhirnya menyebabkan peningkatan pada kualitas hidup masyarakat karena adanya kebebasan pada sektor pertanian. Fase selanjutnya pada tahun 1984 adalah reformasi pada sektor kota yang dilakukan pada berbagai sektor sehingga memunculkan pelaku ekonomi baru dalam perekonomian Tiongkok dan sektor non-negara berkembang pesat. Fase reformasi yang terakhir adalah Tiongkok melakukan liberalisasi ekonomi Tiongkok dengan membuka kerjasama di tingkat Internasional yang ditandai dengan bergabungnya Tiongkok dalam keanggotaan WTO (*World Trade Organization*) (Chow, *China's Economic Transformation*, 2015).

Tidak berhenti pada kepemimpinan Deng, pemimpin-pemimpin Tiongkok selanjutnya juga terus berupaya menginisiasi kebijakan untuk mendorong kemajuan Tiongkok hingga memasuki kancah dunia dan memainkan peranan penting dalam sistem internasional. Termasuk pemimpin saat ini yang dikenal sangat ambisius yakni Xi Jinping. Sejak awal kepemimpinannya pada November 2012, Xi memperkenalkan sebuah visi untuk masa depan Tiongkok yang disebut sebagai “*Chinese Dream*” dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang makmur dalam segala aspek pada tahun 2021 dan masyarakat sosialis modern yang kuat, berbudaya, demokratis, dan harmoni pada tahun 2049 (Wei, 2018). Xi Jinping menekankan bahwasanya “*Chinese Dream*” merupakan sebuah proyek ‘meremajakan’ kembali negara Tiongkok untuk mencapai kemakmuran negara, pembaharuan bangsa, dan kebahagiaan warga negara Tiongkok (China Daily, 2014). Di dalam kongres Partai Komunis Tiongkok ke-18, Xi Jinping menyatakan:

"We must make persistent efforts, press ahead with indomitable will, continue to push forward the great cause of socialism with Chinese characteristics, and strive to achieve the Chinese dream of great rejuvenation of the Chinese nation" (China Daily, 2014).

Hal ini menekankan bahwa “*Chinese Dream*” yang ‘meremajakan’ kembali Bangsa Tiongkok harus diwujudkan dalam upaya dan keinginan yang gigih dengan karakteristik Tiongkok. Dalam upaya untuk mewujudkan “*Chinese Dream*”, Presiden Tiongkok Xi Jinping secara resmi mengangkat inisiatif kebijakan luar negeri dan strategi ekonomi Tiongkok “*One Belt One Road*” (OBOR) (Cipto, 2018). Inisiatif ini kemudian berganti nama menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI).

Menurut Padelford dan Lincoln, kebijakan luar negeri sebagai “Elemen kunci dalam proses dimana suatu negara menerjemahkan tujuan dan minat yang dipahami secara luas kedalam tindakan nyata untuk mencapai kepentingannya”. (Padelford,

Norman, & Lincoln, 1962). Dengan kebijakan *Belt and Road Initiative* ini, Tiongkok berharap dapat mewujudkan “*Chinese Dream*” yang diusung.

Belt and Road Initiative (BRI) hadir untuk membangun kembali Jalur Sutra agar negara-negara yang ada di sepanjang jalur ini dapat bekerja sama dengan saling menguntungkan untuk sama-sama menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan politik internasional. Melalui proyek ini, akan dilaksanakannya transaksi dengan skala besar-besaran hingga miliaran dolar. Meskipun pada implementasinya nanti, kebijakan ini tentu akan lebih menguntungkan Tiongkok sebagai penginisiasi dan pelaksana program tersebut. Kebijakan ini akan mengubah peta ekonomi global karena mengikutsertakan banyak negara, GNP dunia, penduduk dunia, dan cadangan ekonomi global (Siti Nurhasanah, 2019).

Melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok berusaha untuk mengamankan kepentingan ekonominya di kawasan Asia-Pasifik dan penjuru dunia. Hal ini akan menjadi jalan bagi Tiongkok untuk dapat dengan mudah mempengaruhi negara-negara lain terutama dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Pengaruh proyek ini akan memberikan dampak baik dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, sosial, budaya, dan keamanan (Sarwar, 2017).

Dengan skala proyek yang sangat besar bahkan dikatakan sebagai proyek raksasa karena *Belt and Road Initiative* (BRI) mencakup sebagian besar belahan dunia dan akan melibatkan banyak negara serta melewati berbagai kawasan, inisiasi menghidupkan kembali Jalur Sutra tentu dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan yang juga sangat besar yang dapat mengganggu keberlangsungan proyek ini terutama faktor eksternal yang bersifat politik. Mengingat bahwa meskipun Tiongkok saat ini telah menjadi negara yang diakui dan dianggap penting dalam

dunia internasional, masih banyak pihak oposisi yang akan menentang terwujudnya rencana ini.

Tiongkok harus memiliki rencana yang matang dalam melaksanakan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Terutama berhadapan dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat karena proyek ini akan menguatkan posisi Tiongkok dalam perekonomian global sehingga akan merusak kepentingan mereka yang berujung semakin meningkatkan tensi geopolitik diantara mereka, serta stabilitas negara-negara yang turut terlibat dalam proyek ini tidak dapat diprediksi (Singh K. D., 2019).

Kemudian, adanya sejarah ketegangan antara Tiongkok dengan negara-negara sekitar dalam berbagai permasalahan sengketa wilayah dan permasalahan lainnya yang hingga sekarang masih berlanjut menjadi tantangan bagi Negeri Tirai Bambu dalam pelaksanaan BRI. Bahkan bagi negara netral sekali pun akan mempertimbangkan kembali untuk dapat bergabung dalam proyek ini karena secara jelas bahwa Tiongkok berusaha untuk menjadikannya sebagai instrumen untuk mewujudkan hegemoninya untuk mendominasi dunia (Harahap, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah:

“Bagaimana strategi politik luar negeri Tiongkok pada era Presiden Xi Jinping untuk mewujudkan *Belt and Road Initiative*?”

C. Kerangka Teoritis

Neoliberal-Institutionalism mengemukakan bahwasanya negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, namun tetap mengakui pentingnya aktor non-negara seperti organisasi internasional non-pemerintah, dan perusahaan

multinasional. Teori ini melihat bahwa hubungan internasional yang bersifat anarki dapat diatasi dengan suatu integrasi yang mengacu pada suatu kerja sama internasional yang intensif (Jackson & Sorensen, 2005).

Dalam pandangan Neoliberal-Institutionalism menunjukkan bahwa kerja sama regional maupun internasional akan terus berkembang. Dalam konteks ini, para pemikir Neo Liberal-Institutionalism mengusulkan model-model kerja sama antar negara. Salah satu gagasan penting yang juga peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah gagasan menurut Kenneth Oye yang membahas bagaimana strategi negara dalam melibatkan diri pada kerja sama di situasi anarki dan gagasan menurut Robert O. Keohane & Joseph Nye yang membahas tentang dimensi kerja sama internasional yang kompleks hingga menimbulkan rasa saling ketergantungan antar negara tersebut (Hadiwinata, 2017, pp. 94-96).

1. Payoff Structure

Kenneth Oye dalam bukunya yang berjudul “*Cooperation Under Anarchy*” mengemukakan bahwa kerjasama yang melibatkan banyak aktor akan membentuk suatu model yang dikenal sebagai “*Payoff Structure*”. Model ini mengandung beberapa karakter, yaitu: pertama, kecenderungan manusia untuk jujur atau curang akan membentuk situasi harmoni atau pengkhianatan. Kedua, pemberian insentif atau sanksi yang tepat dalam meningkatkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan (*Mutual Cooperation*) dan upaya menghindari situasi saling mengkhianati (*Mutual Defection*). Ketiga, adanya resiprositas (*reciprocity*) atau suatu hubungan timbal balik antar aktor (Oye, 1986).

Agar terciptanya situasi yang optimal, model “*Payoff Structure*” mengharuskan negara menempuh tiga macam strategi: pertama, strategi unilateral yang merupakan tindakan kooperatif untuk mendapatkan insentif berupa kerja sama dan mengurangi kecenderungan kecurangan dari partner kerja sama. Kedua, strategi bilateral yang merupakan strategi menawarkan atau meminta suatu insentif dari partner kerja sehingga terbentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Ketiga, strategi multilateral yakni menginisiasi sekaligus mempengaruhi pembentukan rezim internasional dengan insentif dan sanksi yang jelas untuk menciptakan suatu harmoni dalam kerja sama antar negara. Intinya, pada model “*Payoff Structure*” menurut Kenneth Oye dalam perspektif Neoliberal Institutionalism ini menekankan bahwa hanya negara-negara besar (*Great Power*) dengan sumber daya dan otoritas kuat yang dapat memberikan insentif bagi partner kerja sama nya, sekaligus memberi tekanan atau sanksi terhadap partner kerja yang berkhianat (Oye, 1986).

2. Complex Interdependence

Selanjutnya, salah satu karya penting lainnya dalam perspektif Neoliberal Institutionalism adalah karya Robert O. Keohane dan Joseph Nye yang dikenal sebagai “*Power and Interdependence*” dimana didalamnya mengemukakan dimensi baru dalam hubungan internasional yang bersifat “saling ketergantungan yang kompleks” (*Complex Interdependence*). Prinsip ini mengandung tiga karakteristik (Keohane & Nye, 1977).

Pertama, jalur majemuk (*multiple channel*) yang merupakan jaringan kompleks antar negara, organisasi internasional, birokrasi, korporasi transnasional, serta masyarakat dapat menentukan arah politik dunia.

Kedua, karakter isu majemuk (*multiple issues*) yang merupakan hubungan antar negara yang luas dengan berbagai isu saling berkaitan sehingga akan menimbulkan saling ketergantungan antar negara yang bersangkutan.

Ketiga, militer tidak lagi menjadi instrument utama (*decreasing role of military power*) dalam situasi ini, penggunaan militer sebagai instrumen penekan kepentingan tidak lagi relevan untuk digunakan karena adanya inovasi teknologi dan kekuatan ekonomi.

Berkaitan dengan pembahasan masalah pengaruh kebijakan politik luar negeri dan strategi ekonomi OBOR Tiongkok, teori Neoliberal-Institutionalism menjelaskan pentingnya hubungan yang sinergi dan saling menguntungkan antara Tiongkok dengan negara-negara yang menyetujui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) melalui model “*Payoff Structure*” dan prinsip “ketergantungan yang kompleks” dengan tiga macam strateginya maka China selaku pencetus inisiasi *Belt and Road Initiative* (BRI) memiliki otoritas dalam mengayomi dan mengontrol jalannya kerja sama antar anggota negara yang bersangkutan untuk terciptanya hubungan timbal balik yang efisien.

D. Hipotesa

Strategi politik luar negeri Tiongkok pada era Presiden Xi Jinping untuk mewujudkan *Belt and Road Initiative* melalui:

- Pertama, pengembangan kerja sama internasional sinergis yang saling ketergantungan dengan berbagai Kawasan di dunia (Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, dan Eropa)

- Kedua, investasi Tiongkok terhadap negara-negara terkait bidang pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dengan China
- Ketiga, peningkatan kerja sama dengan organisasi internasional untuk mempengaruhi kebijakan yang mengarah kepada pembentukan kerja sama antar negara anggota

E. Tujuan Penulisan

1. Memahami negara Tiongkok secara umum, politik, dan ekonomi sebagai penginisiasi proyek *Belt and Road Initiative* (BRI)
2. Menjelaskan mengapa *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi strategi politik luar negeri Tiongkok dalam rangka pengembangan hubungan politik dan perekonomian Tiongkok dengan negara yang menyetujui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI)

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang didapatkan melalui pencarian untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang diajukan. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode pengumpulan data melalui berbagai pencarian untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanatif. Metode kualitatif menekankan pada analisis suatu fenomena tertentu (Effendi & Tukiran, 2012, p.

10). Analisa tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan (eksplanasi) permasalahan yang ada di penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang didapatkan dari bahan-bahan dokumenter tentang objek penelitian seperti publikasi/buku, data mentah (raw data), internet atau media lainnya (Effendi & Tukiran, 2012, p. 11). Analisa tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan (eksplanasi) permasalahan yang ada di penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu *library research* dengan fokus pada data-data pustaka yang dianalisis untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik

4. Analisis Data

Analisis data adalah data yang telah didapatkan dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis kemudian dianalisis secara kualitatif-eksplanatif

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi lima bab, diantaranya:

Bab I : Berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritis yang digunakan, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Memberi gambaran mengenai sejarah utama proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), kemudian akan masuk ke upaya Tiongkok dalam menjalin kerja sama dengan berbagai kawasan di dunia.

Bab III : Memaparkan mengenai investasi Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi digital sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas dengan berbagai kawasan

Bab IV : Menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam pengembangan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dan bagaimana upaya Tiongkok mencari dukungan serta pengaruh di organisasi internasional untuk membangun kerja sama antar negara anggota

Bab V : Penutup dan kesimpulan skripsi.